

# GEOGRAFI PENGEMBANGAN WILAYAH

## TUGAS MERIVIEW JURNAL



DI SUSUN OLEH:

LELI YANTI/1405035127

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GEOGRAFI  
PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**2016**

## REVIEW JURNAL

### PENGEMBANGAN WILAYAH DI PERBATASAN

#### 1. STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH DI PERBATASAN NUSA TABUKAN KEPULAUAN SANGIHE BERBASIS EKOWISATA BAHARI.

##### PENDAHULUAN

Sebagai daerah kepulauan di perbatasan Negara, sumber daya bahari mendominasi wilayah ini. Salah satu kawasan yang memiliki sumber daya bahari yang melimpah adalah Kawasan Nusa Tabukan. Nusa Tabukan merupakan gugusan pulau dengan keindahan alam pantai, pesisir, terumbu karang serta kehidupan bawah laut yang dapat dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata. Kawasan ini dikenal dengan eksotisme pulau kecil, pasir putih, pesisir, terumbu karang serta pemandangan laut yang Indah. Nusa Tabukan juga mulai dikenal dengan ditemukannya habitat Dugong, salah satu satwa laut yang dilindungi di Indonesia. Pulau Bukide, salah satu pulau dalam kawasan ini merupakan satu dari sembilan spot penyelaman di Kepulauan Sangihe yang dikenal dengan koloni ikan. *Diving Spot* di Pulau Bukide meliputi *coral garden* dan padang lamun. Juga terdapat Pulau Poa dan Pulau Liang, dua pulau karang tidak berpenghuni dengan hamparan pasir putih, yang merupakan rumah bagi burung kumkum putih. Nusa Tabukan juga dikenal sebagai wilayah perikanan tangkap yang menjadi penyuplai kebutuhan perikanan di pesisir utara Kepulauan Sangihe.

Masyarakat nelayan tradisional yang mendiami kawasan ini merupakan bagian dari masyarakat bahari Sangihe yang sangat menghormati laut. Dalam falsafah hidup masyarakat lokal, laut dianggap sebagai pemberi kehidupan. Penghormatan masyarakat bahari di kepulauan Sangihe dapat dilihat pada perbedaan bahasa atau penyebutan, masyarakat memiliki bahasa khusus di laut dengan makna yang lebih dalam. Penghormatan masyarakat terhadap laut juga dilakukan melalui penggunaan metode tangkap tradisional untuk menjaga kelestarian laut disekitar mereka.

Kekayaan sumber daya bahari di Nusa Tabukan belum selaras dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Secara administratif kawasan ini masuk dalam wilayah Kecamatan Nusa Tabukan dengan lima buah kampung didalamnya. Lemahnya daya saing ekonomi masyarakat disebabkan antara lain oleh terbatasnya pilihan / alternatif mata pencaharian penduduk pulau-pulau kecil yang cenderung homogen dan

sangat tergantung pada sumberdaya pesisir dan laut. Secara keseluruhan, kegiatan ekonomi di Nusa Tabukan masih sangat tergantung pada aktivitas ekonomi di luar pulau, terutama pada Pulau Sangihe Besar sebagai induknya (*mainland*). Sebagai masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan, aktivitas ekonomi juga dilakukan ke Filipina Selatan dengan sistem barter. Hubungan kekerabatan dan transaksi ekonomi menjadikan sebagian masyarakat bisa berbahasa *tagalog*.

## **BEBERAPA KONSEP**

### **1 Pengembangan Pariwisata**

Dalam era otonomi daerah, di mana daerah memiliki kewenangan dalam merencanakan dan menyelenggarakan pembangunan maka diperlukan suatu model pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan, kapasitas serta karakteristik wilayah masing – masing, sehingga diperlukan upaya untuk menggali potensi daerah sebagai dasar dalam perumusan strategi pembangunan. Menurut Tantra (2014) dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan diperlukan sebuah kerangka teoritik, yaitu paradigma berpikir yang memperhatikan ruang secara realistik. Ruang tidak berarti fisik, tetapi juga lingkungan sosial budaya dalam arti luas. Pola dasar pembangunan yang memperhatikan ruang (fisik dan non fisik) secara holistik yaitu ruang sebagai kesatuan wilayah administratif, ekonomi, historis dan empiris. Dengan demikian pola pembangunan dirumuskan berdasarkan kondisi dan potensi lingkungan dan manusianya. Pengembangan destinasi wisata dalam kerangka pembangunan daerah memiliki hubungan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi dalam tataran makro, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam tataran mikro. Sehingga pengembangan pariwisata daerah haruslah juga memperhitungkan keuntungan dan manfaat bagi banyak pihak, terutama masyarakat lokal. Pengembangan pariwisata yang baik dapat mendorong terbukanya peluang kerja, pengembangan produk lokal, serta kesempatan pendidikan dan pelatihan masyarakat.

### **2 Wisata Bahari dan Ekowisata**

Wisata bahari merupakan jenis wisata yang memanfaatkan potensi lingkungan wilayah pesisir dan lautan secara langsung dan tidak langsung. Kegiatan langsung diantaranya adalah berperahu, berenang, *snorkeling*, *diving* dan memancing. Wisata

bahari tidak dapat dilepaskan dari kegiatan wisata alam dimana kegiatan ini sering disebut juga sebagai kegiatan wisata pantai yang memanfaatkan potensi lingkungan pantai sebagai daya tarik utama. Bentuk wisata bahari dapat berbeda sesuai karakteristik pantai dan lingkungan sosial budaya yang ada di lingkungan pantai tersebut. Menurut Fandeli (2002: 50), daya tarik wisata bahari wisata bersumber dari bentang laut (*seascope*) dan bentang darat (*coastal landscape*). Keindahan alam, pantai berpasir, terumbu karang, kekayaan sejarah alam merupakan atraksi utama bagi wisatawan baik itu wisatawan yang mencari ketenangan dan rekreasi maupun bagi wisatawan minat khusus yang lebih mencari aktivitas yang bersifat menantang seperti *fishing* atau *diving* (inskeep, 1991).

Menurut Fandeli (2002: 50), ada tiga jenis kegiatan wisata bahari, yaitu: (1) *Surface activities*, Merupakan aktivitas wisata yang dilakukan di permukaan air, (2) *Contact activities*, Merupakan aktivitas yang dilakukan wisatawan dengan melakukan kontak air, (3) *Littoral activities*, Merupakan kegiatan berwisata yang dilakukan di darat. Pengembangan pariwisata bahari dapat menyebabkan terjadinya permasalahan lingkungan, baik lingkungan alam maupun sosial masyarakat. Dampak – dampak aktivitas pariwisata tersebut kemudian memunculkan konsep wisata yang berorientasi terhadap keberlanjutan ekologi dan pemberdayaan masyarakat. Konsep ekowisata pada dasarnya adalah konsep pengembangan pariwisata yang memandang sumber daya wisata sebagai bagian dari ekosistem dimana terjadi interaksi antara sistem lingkungan, ekonomi dan sosial sehingga dalam pengembangannya harus mempertimbangkan tercapainya ekologis, peningkatan kualitas hidup dan keberlanjutan ekonomi. Konsep wisata ini tidak hanya sekedar untuk melakukan aktivitas wisata tetapi terkait juga dengan konsep pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal. Definisi tentang ekowisata dikemukakan oleh *The International Ecotourism Society* (TIES) tahun 1990 sebagai berikut “Ekowisata adalah kegiatan wisata alam yang bertanggung jawab dengan menjaga keaslian dan kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat”. Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa dalam kegiatan ekowisata terkandung unsure – unsur kepedulian, tanggung jawab, dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat. Ekowisata merupakan upaya

untuk memaksimalkan sekaligus melestarikan potensi sumber daya alam dan sosial budaya dalam konteks pembangunan ekonomi berkelanjutan.

## HASIL DAN PEMBAHASAAN

### a. Potensi Ekowisata Bahari di Kawasan Nusa Tabukan

- Wilayah Pulau, Daratan dan Pesisir

Pulau – pulau kecil dalam kawasan Nusa Tabukan memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai bagian dari kawasan ekowisata bahari. Dengan hamparan pantai berpasir putih yang bersih dan masih alami, wilayah pesisir pulau memberikan nilai tambah bagi pengembangan kawasan. Kegiatan wisata bahari dapat dikembangkan melalui pemanfaatan pulau-pulau kecil sebagai kawasan wisata. Empat pulau dalam kawasan Nusa Tabukan memiliki karakteristik masing-masing, sehingga diharapkan mampu menarik minat wisatawan minat khusus untuk berkunjung ke kawasan ini. Rata-rata daratan pulau dalam kawasan merupakan perbukitan tandus dengan rumput dan alang-alang. Daratan Pulau Nusa dan Pulau Bukide dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan kelapa milik masyarakat lokal. Lahan dataran rendah merupakan hutan bakau dan pemukiman masyarakat. Bakau di Pulau Bukide terdiri dari 3 Jenis, yaitu *rhizophora spp*, *avicenia spp*, *bruguera spp* (DKP Kab. Kepl. Sangihe, 2015), dengan kepadatan mencapai 50%. Dua pulau dalam kawasan ini, Pulau Poa dan Pulau Liang merupakan pulau tidak berpenghuni. Namun pantai di Pulau Poa dimanfaatkan sebagai tempat singgah / istirahat nelayan dan dibangun pondok-pondok kecil di pinggir pantai. Bukit di Pulau Poa dan Pulau Liang juga merupakan rumah bagi burung *punting* (kum-kum putih), yang menempati pohon dan lubang-lubang batu di puncak pulau. Burung-burung ini setiap harinya bermigrasi ke Pulau Sangihe besar dan akan kembali ke Pulau Poa dan Pulau Liang pada sore harinya. Pulau Poa dan Pulau Liang dimanfaatkan untuk kegiatan fotografi dan pengamatan burung.

- Wilayah Perairan dan Lingkungan Bawah Laut

Wilayah perairan Nusa Tabukan sejak lama telah dimanfaatkan oleh masyarakat Nusa Tabukan dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, serta masyarakat pesisir utara Pulau Sangihe Besar untuk mencari ikan. Wilayah perairan Nusa Tabukan dikenal sebagai wilayah tangkapan yang menyuplai kebutuhan ikan di Pulau Sangihe Besar. Melimpahnya jenis dan jumlah ikan di kawasan ini mendorong pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menetapkan kawasan ini masuk dalam klaster pengembangan minapolitan. Minapolitan merupakan kawasan pengembangan ekonomi yang berbasis pada aktivitas bahari dan kegiatan perikanan. Selain untuk aktivitas sector perikanan, wilayah perairan Nusa Tabukan merupakan jalur perhubungan laut Sangihe – Filipina, juga dimanfaatkan untuk aktivitas wisata bahari yaitu: *diving*, *snorkeling*, dan *fishing*.

- Sosial Budaya

Masyarakat Nusa Tabukan merupakan masyarakat monoetnis, yang seluruhnya berasal dari suku Sangihe, salah satu penandanya adalah bahasa yang digunakan sehari-hari yaitu bahasa sangihe. Dalam falsafah hidup masyarakat lokal, laut merupakan pemberi kehidupan sehingga masyarakat memperlakukan laut secara khusus. Perlakuan khusus terhadap laut tercermin dalam aktivitas hidup masyarakat. Terdapat perbedaan bahasa atau penyebutan ketika berada di darat dan di laut. Masyarakat memiliki *Sasahara*, bahasa khusus di laut. Penggunaan bahasa dengan makna yang lebih sopan digunakan ketika berada di laut, sebagai bentuk penghormatan. Selain penggunaan *Sasahara*, penghormatan terhadap laut dilakukan masyarakat melalui pembagian wilayah tangkap. Terdapat aturan tidak tertulis dalam masyarakat, yang mengarahkan masyarakat untuk tidak menangkap ikan karang di area terumbu karang Pulau Poa dan Pulau Liang, dimana area ini dikhususkan sebagai wilayah pemijahan ikan. Hal ini dilakukan untuk menyeimbangkan siklus kehidupan ikan dan biota laut lainnya. Sebagai satuan komunitas dalam struktur sosial masyarakat bahari, masyarakat Sangihe termasuk juga di wilayah Nusa

Tabukan mengembangkan tradisi bahari berdasarkan nilai, kearifan dan pengetahuan yang dimilikinya.

Aktivitas ekonomi di kawasan ini sangat tergantung dari Pulau Sangihe Besar sebagai *Mainland*. Namun sebagai bagian dari daerah perdagangan lintas batas, masyarakat juga melakukan aktivitas ekonomi di Filipina. Terdapat keunikan dalam proses transaksi masyarakat di Filipina, dimana transaksi dilakukan melalui proses barter.

### 3 Strategi Pengembangan

Selanjutnya dirumuskan strategi dan program pengembangan ekowisata bahari

berdasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal.

- Strategi *Strength–Opportunity* (S–O)

Strategi *strength–opportunity* merupakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, sehingga menghasilkan strategi pengembangan produk ekowisata bahari di perbatasan Negara.

- Strategi *Strength–Threat* (S–T)

Strategi *strength–threat* merupakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman, dimana strategi yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah strategi peningkatan investasi / pengembangan kelembagaan dan strategi peningkatan kerjasama regional. Untuk menjadikan Nusa Tabukan sebagai kawasan ekowisata, maka strategi ini sangat diperlukan untuk mendukung pengembangan tersebut.

- Strategi *Weakness–Opportunity* (W–O)

Upaya untuk meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang merupakan strategi yang sangat penting digunakan dalam pengembangan sebuah destinasi pariwisata. Sehingga strategi yang ditemukan dalam penelitian ini adalah strategi pengembangan pasar dan promosi serta strategi pengembangan sarana pariwisata.

- Strategi *Weakness–Threat* (W–T)

Strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman merupakan strategi yang mendukung dalam pengembangan Nusa Tabukan sebagai kawasan ekowisata. Dalam strategi ini dirumuskan strategi pengembangan sumber daya manusia dan manajemen destinasi.

## **KESIMPULAN**

Kawasan Nusa Tabukan memiliki potensi sumber daya untuk dikembangkan sebagai kawasan Ekowisata Bahari. Keragaman sumber daya alam meliputi ekosistem pulau kecil, pantai berpasir putih, ekosistem terumbu karang, serta lingkungan bawah laut yang masih alami, ditunjang oleh tradisi dan pola hidup masyarakat bahari setempat dapat dikemas sebagai daya tarik utama di kawasan ini. Fasilitas, aksesibilitas, serta layanan penunjang pariwisata masih memiliki keterbatasan sehingga perlu upaya perbaikan. Ketersediaan sumber daya sebagai potensi wisata, juga peluang pengembangan yang ada belum mampu mendorong pengembangan kawasan ini. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi kondisi ini, seperti: Keterbatasan SDM Pariwisata (kualitas dan kuantitas), minimnya infrastruktur, sistem promosi dan komunikasi pariwisata, akses dalam destinasi, fasilitas pariwisata, serta minimnya alokasi dana terhadap pengembangan pariwisata. Dalam upaya untuk mengembangkan kawasan Nusa Tabukan sebagai kawasan wisata berbasis ekowisata bahari, maka dirumuskan beberapa strategi pengembangan yang diharapkan mampu untuk menjawab kebutuhan pengembangan wisata berdasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal. Formulasi strategi yang tepat dalam pengembangan kawasan Nusa Tabukan ini adalah strategi pengembangan produk ekowisata bahari di wilayah perbatasan. Selain itu dirumuskan juga strategi pengembangan alternatif yaitu: peningkatan kapasitas SDM dan manajemen destinasi, pengembangan pasar dan promosi, pengembangan sarana pariwisata serta peningkatan kerjasama regional dan peningkatan investasi.

## **KEKURANGAN DAN KELEBIHAN**

### **1) Kelebihan**

Kelebihan dari penelitian ini adalah cara memperkenalkan potensi wisata sebagai salah satu pengembangan wilayah di perbatasan cukup bagus dan juga wisata bahari yang ada di Nusa Tabukan kepulauan Sangihe sangat menarik dengan potensi yang dimiliki di daerah pesisir pantainya.

### **2) Kekurangannya**

Kekurangan dari jurnal penelitian ini penulis tidak terlalu memikirkan cara atau solusi untuk aksesibilitasnya untuk pengembangan wilayah daerah perbatasan berbasis ekowisata bahari.



## **2. PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI UPAYA PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DI INDONESIA.**

### **PENDAHULUAN**

Pembangunan Nasional Negara Indonesia secara umum ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan kehidupan masyarakat secara adil dan merata diseluruh pelosok wilayah NKRI, baik yang tinggal di daerah perdesaan (rural area) maupun daerah perkotaan (urban area). Dalam pelaksanaan pembangunan Nasional tersebut sampai saat ini masih banyak ditemukan masalah yang belum dapat dipecahkan, beberapa yang terpenting diantaranya masalah kemiskinan, kesenjangan kemajuan antara wilayah di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI), kesenjangan kemajuan antara kota- desa, masalah ketenaga-kerjaan, masalah lingkungan hidup, dsb. Salah satu wilayah yang perkembangannya cukup tertinggal dibandingkan wilayah lain adalah wilayah perbatasan. Selama ini wilayah perbatasan identik dengan daerah perdesaan, daerah pinggiran, daerah tertinggal, atau daerah miskin yang cenderung termarginalkan. Terdapat dua pengertian wilayah perbatasan dalam konteks pembangunan Nasional di Indonesia. Dalam konteks Negara, wilayah perbatasan melingkupi daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan wilayah

teritorial negara tetangga, sedangkan dalam tulisan ini wilayah perbatasan lebih diartikan sebagai bagian dari suatu wilayah administrasi tertentu yang berbatasan langsung dengan wilayah administrasi lain di sekitarnya dalam kerangka NKRI. Kedua tipe wilayah perbatasan tersebut merupakan bagian integral pelaksanaan pembangunan Nasional Negara Indonesia. Berbagai upaya dilakukan Pemerintah NKRI untuk lebih pemeratakan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan ke seluruh pelosok Negara.

Dalam rangka pengurangan ketimpangan antar wilayah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM- Nasional) tahun 2004 – 2009 (Perpres No. 7/2005) telah mengamanatkan bahwa pengembangan daerah tertinggal termasuk wilayah perbatasan terintegrasi dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi, melalui keterkaitan mata rantai proses produksi dan distribusi antara wilayah-wilayah tertinggal dengan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh. Fakta menunjukkan sampai dengan saat ini sektor pertanian masih merupakan sektor paling dominan di Indonesia dan menjadi mata pencaharian terbesar penduduk. Usaha-usaha di sektor pertanian lebih banyak dilakukan di daerah perdesaan (termasuk di dalamnya wilayah perbatasan), oleh karena itu pembahasan dalam rangka pengembangan daerah perbatasan tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan sektor pertanian dan pembangunan perdesaan secara umum.

#### A Daerah Perbatasan dalam Konteks Pembangunan Nasional

Pembangunan Nasional dilaksanakan secara terencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berkelanjutan untuk memacu peningkatan kemampuan Nasional, dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju. Pembangunan Nasional dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. . Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan, dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang sehingga akan saling mengisi, saling melengkapi dalam kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan Nasional. Hal ini berarti pembangunan daerah harus merata di seluruh wilayah dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam pelaksanaan pembangunan masih diperlukan perhatian yang lebih besar khususnya kepada daerah yang terbelakang, daerah yang padat dan daerah yang

sangat kurang penduduknya, daerah transmigrasi, daerah terpencil dan daerah perbatasan, serta daerah yang memiliki ciri khas seperti daerah tertentu di KTI.

Pada umumnya terdapat kecenderungan bahwa daerah yang telah berkembang menjadi pusat pelayanan (misalnya daerah perkotaan), akan menyerap lebih banyak investasi dan intervensi pembangunan. Pertumbuhan suatu wilayah akan saling terkait dengan perkembangan fasilitas pelayanan, disebabkan pertumbuhan wilayah membutuhkan dukungan pengadaan dan perluasan pelayanan. Ketersediaan pelayanan di suatu wilayah tersebut pada gilirannya akan menstimulir pertumbuhan wilayah.

#### B Tipe-Tipe Daerah Perbatasan

Wilayah perbatasan merupakan wilayah pertemuan antara dua wilayah administrasi, namun sumberdaya alam (natural resources) dan masyarakatnya bisa menjadi bagian komplementer pada satu satuan sistem fungsional bagi pengembangan wilayah yang didukung oleh sistem prasarana wilayah bersama.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi D.I Yogyakarta bekerjasama dengan Lembaga Penelitian P4N UGM tahun 1993, wilayah perbatasan dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) tipe (Listiyah M, 1996), yaitu:

- a. Wilayah buntu
- b. Wilayah perbatasan jalur perifer
- c. Wilayah perbatasan kontak tinggi

#### C Permasalahan Daerah Perbatasan

Beberapa permasalahan yang secara umum dijumpai di daerah perbatasan meliputi:

- (a) Sering timbul permasalahan dalam hal kebijaksanaan yang harus diterapkan;
- (b) Terdapat kecenderungan tumbuh lebih lambat (untuk tipe wilayah perbatasan a dan b); (c) Benturan dua kepentingan berbeda antar dua wilayah; dan (d) Belum ada kesatuan dalam perencanaan wilayah perbatasan itu sendiri yang menimbulkan ketidakserasian persepsi dan aspirasi pembangunan, yang kemudian akan berakibat pada ketidakserasian program-program pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah di daerah

perbatasan tersebut. Khusus untuk wilayah perbatasan, diperlukan koordinasi yang matang antara dua wilayah administrasi untuk memadukan dua atau lebih kepentingan yang berbeda. Untuk mencapai optimalisasi pembangunan di wilayah perbatasan, terlebih dahulu perlu diketahui karakteristik wilayahnya, dengan melakukan identifikasi potensi, kendala, dan peluang pengembangannya. Dengan demikian maka penyusunan rencana pengembangan wilayah perbatasan tersebut akan menghasilkan rencana intervensi pembangunan, baik dalam bentuk program atau proyek yang berhasil guna dan berdaya guna. Sebagai akibatnya kesejahteraan masyarakat di perdesaan, yang mencakup sekitar 60 persen penduduk Indonesia, khususnya petani masih sangat rendah tercermin dari jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin yang lebih besar dibandingkan wilayah perkotaan (Anonimus, 2005).

#### D Daerah Perbatasan dan Pembangunan Perdesaan

Daerah perbatasan yang pada umumnya berupa wilayah perdesaan adalah merupakan bagian dari Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) yang diharapkan akan tumbuh dan berkembang sejajar dengan daerah lain. Dalam konteks kewilayahan, terdapat kecenderungan di daerah perbatasan pertumbuhan wilayahnya lebih lambat dibandingkan dengan wilayah bukan perbatasan, hal ini disebabkan adanya isolasi fisik untuk daerah perbatasan yang sekaligus merupakan wilayah pedalaman dan terjadinya isolasi perhatian dari pemerintah yang lebih tinggi serta sering terjadi benturan dari kebijaksanaan yang berbeda dalam peruntukkan lahan di daerah perbatasan (Mubyarto, dkk (1991) dalam Listiyah M (1996)). Berkaitan dengan pendekatan keruangan pada studi geografi, untuk mengembangkan wilayah perbatasan yang pada umumnya berupa perdesaan, suatu kebijaksanaan pembangunan keruangan sudah seharusnya mempromosikan pertumbuhan pusat-pusat pelayanan perdesaan yang dapat menghubungkan pusat-pusat atau kota-kota dengan daerah buriloka termasuk daerah di sepanjang perbatasan.

Perencanaan pengembangan wilayah pada hakekatnya merupakan kelanjutan dari program pembangunan yang berupaya meningkatkan pemanfaatan sumberdaya agar lebih bermanfaat untuk mendukung kelangsungan

hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam perkembangannya suatu wilayah secara struktur sosial dan ekonominya akan ditentukan oleh potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan aspek kelembagaan terutama menyangkut teknologi, kesiapan aparat, dan sumber pendanaan (Sugandy (1987) dalam Listiyah M (1996)). Dalam kaitannya dengan pengembangan wilayah desa-desa perbatasan agar dapat serasi dengan kondisi desa perlu dilihat potensi desa yang ada. Potensi desa adalah sumber-sumber alami dan sumber-sumber manusiawi yang dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup masyarakat desa setempat. Potensi desa tersebut dapat dibedakan dalam potensi fisik dan non fisik (Bintarto, 1983). Dalam operasional di lapangan, komponen potensi tersebut dapat berkembang sesuai dengan tujuan kegiatan perencanaan. Untuk menilai tingkat perkembangan wilayah dapat dinyatakan dalam bentuk indeks yang disebut sebagai indeks tingkat perkembangan wilayah. Upaya ini harus diikuti dengan penyediaan infrastruktur fisik, sosial dan ekonomi beserta pemerataan dan penyebarannya, sehingga mampu meningkatkan aksesibilitas daerah perdesaan terhadap pusat-pusat pembangunan sekaligus mengatasi keterasingan untuk sebagian wilayah perbatasan.

#### E Strategi Pengembangan Daerah Perbatasan

Untuk mengatasi permasalahan di daerah perbatasan, tidak dapat dilepaskan dengan pembangunan pertanian dan daerah perdesaan secara umum. Dalam upaya mengurangi kesenjangan perkembangan antar wilayah, RPJM Nasional 2004 – 2009 telah menggariskan bahwa sasaran pembangunan yang dilakukan adalah meningkatkan peran perdesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan, meningkatkan pembangunan pada daerah- daerah terbelakang dan tertinggal, meningkatkan perkembangan wilayah yang didorong oleh daya saing kawasan dan produk-produk unggulan daerah, serta meningkatkan keseimbangan pertumbuhan pembangunan antar kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil dengan memperhatikan keserasian pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah. Guna mencapai sasaran tersebut, telah disusun prioritas pembangunan dan

arah kebijakan pembangunan perdesaan dan pengurangan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Pembangunan perdesaan dilakukan dengan mengembangkan diversifikasi kegiatan ekonomi perdesaan; meningkatkan promosi dan pemasaran produk-produk pertanian dan perdesaan lainnya; memperluas akses masyarakat perdesaan ke sumber daya-sumber daya produktif, pelayanan publik dan pasar; meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan melalui peningkatan kualitas penduduknya, penguatan kelembagaan dan modal sosial masyarakat perdesaan; meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan serta meminimalkan risiko kerentanan; serta mengembangkan praktek- praktek budidaya pertanian dan usaha non pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sedangkan pengurangan ketimpangan pembangunan wilayah dilakukan dengan: (a) mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh yang selama ini masih belum berkembang secara optimal, sehingga dapat menjadi motor penggerak bagi wilayah- wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu 'sistem wilayah pengembangan ekonomi' yang sinergis; (b) meningkatkan keberpihakan pemerintah untuk mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil sehingga wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengejar ketertinggalan pembangunannya dengan daerah lain; (c) mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking menjadi outward looking, sehingga kawasan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga, baik dengan menggunakan pendekatan pembangunan melalui peningkatan kesejahteraan (prosperity approach) maupun keamanan (security approach); (d) menyeimbangkan pertumbuhan pembangunan antar kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil secara hirarkis dalam suatu 'sistem pembangunan perkotaan nasional;' (e) meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi yang berada di wilayah perdesaan dengan yang berada di perkotaan; (f) mengoperasionalkan 'Rencana Tata Ruang' sesuai dengan hirarki perencanaan (RTRW-Nasional, RTRW-Pulau, RTRW-Provinsi, RTRW-

Kabupaten/Kota) sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar wilayah. Untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah langkah prioritas jangka pendek yang dilakukan menitik beratkan pada percepatan pembangunan infrastruktur, yang dilakukan antara lain dengan: (i) penyediaan sarana irigasi, air bersih, dan sanitasi dasar terutama daerah-daerah langka sumber air bersih; (ii) pembangunan jalan, jembatan, dan dermaga terutama daerah terisolasi dan tertinggal; (iii) redistribusi sumber dana kepada daerah-daerah yang memiliki pendapatan rendah dengan instrumen Dana Alokasi Khusus (DAK) (Sri Mulyani Indrawati, 2005).

## **KESIMPULAN**

- Guna mendukung pengembangan wilayah perbatasan masih perlu dilakukan penelitian mendalam untuk menemu-kenali faktor-faktor penyebab lambatnya pertumbuhan daerah perbatasan dalam berbagai aspek kewilayahan. Beberapa aspek penting yang perlu dikaji lebih lanjut diantaranya: (1) Karakteristik potensi wilayah (terutama potensi fisik wilayah); (2) Kondisi sosial-ekonomi serta sosial-budaya penduduk setempat; (3) Jenis, ketersediaan, dan daya layan dari berbagai macam prasarana dan sarana pelayanan penduduk; serta (4) Kebijaksanaan pembangunan daerah perbatasan dan perumusan strategi pengembangan yang tepat secara umum dan lokalita;
- Dalam RPJM-Nasional tahun 2004 – 2009 pengembangan daerah perdesaan dan pengurangan ketimpangan antar wilayah (termasuk di dalamnya daerah perbatasan) merupakan prioritas dan arah kebijakan pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- Pengembangan dan/atau pembangunan daerah perbatasan juga identik dengan pembangunan perdesaan yang berbasis pada sektor usaha pertanian. Dalam implementasinya masih banyak terdapat kesulitan untuk memadukan berbagai macam program dan proyek pemerintah daerah yang dikelola oleh berbagai macam instansi terkait, sehingga masih terkesan terdapat tumpang tindih (overlapping) program dan proyek pemerintah. Padahal untuk menghasilkan kemajuan yang cukup

signifikan di daerah perbatasan diperlukan sinergi dan keterpaduan program dan proyek instansional.

### **KEKURANGAN DAN KELEBIHAN**

#### **1. Kelebihan**

Kelebihan dari jurnal penelitian ini adalah penulis menyampaikan pengembangan wilayah di daerah perbatasan khususnya di pedesaan cukup detail serta memberikan strategi yang baik untuk melakukan pengembangan wilayah.

#### **2. Kekurangan**

Kekurangan dari jurnal penelitian ini adalah kurangnya penelitian atau hal yang di kaji dalam pengembangan wilayah di daerah perbatasan.

### **PERBANDINGAN DAN PERSAMAAN**

Sebelum melakukan perbandingan dan persamaan sebaiknya hal yang pertama di lakukan adalah melakukan persamaannya dulu. Berikut persamaannya kedua jurnal penelitian ini:

Persamaan



1. kedua jurnal penelitian ini sama-sama membahas pengembangan wilayah di daerah perbatasan.

**Perbandinngan**

1. Kedua jurnal ini membahas pengembangan wilayah di daerah perbatasan akan tetapi perbedaanya berada pada daerah yang akan di kembangkan di jurnal yang pertama lebih membahas pengembangan wilayah di daerah perbatasan berbasis ekowisata bahari sedangkan di jurnal yang kedua lebih membahas pengembangan wilayah sebagai upaya pemerataan pembangun wilayah di Indonesia.
2. Pada jurnal penelitian ini kedua jurnal melakukan pengembangan wilayah di daerah berbeda yang pertama lebih ke daerah pedalaman atau di daerah terpencil dan jurnal yang kedua lebih melakukan pengembangan wilayah di Indonesia.

**DAFTAR JURNAL**

Anonimus, 2000. Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 - 2004. Cetakan I. Surabaya:

Arkola.

Badan Pusat Statistik, 2013. Sangihe Dalam Angka. Tahun.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2011. Profil Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tahunan.

